

## DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, RW. 2023. *2.402 Istri Di Jombang Gugat Cerai Suami, Faktor Ekonomi Paling Dominan*. Diakses pada 1 November 2023 dalam <https://radarjombang.jawapos.com/berita-daerah/661027568/2402-istri-di-jombang-gugat-cerai-suami-faktor-ekonomi-paling-dominan>.
- Albrecht dan Zemke dalam Dwiyanto. 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Asshofa, Burhan. 2001. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Badan Peradilan Agama. 2022. *Faktor Pendukung dan Penghambat Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian*. Diakses pada 16 November 2023 dalam <http://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/faktor-pendukung-dan-penghambat-pemenuhan-hak-hak-perempuan-dan-anak-pasca-perceraian>.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Timur. 2024. *Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Jawa Timur Province in Figures 2024*. Surabaya: Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa timur.
- Badan Pusat Statistik. 2024. *Statistik Indonesia 2024*. Jakarta: Badan Pusata Statistik.
- Busriyanti. 2022. *Kebijakan Bimbingan Pra Nikah dalam Perspektif Maqasid al-usrah*. Depok: Pena Salsabila.

- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI. 2021. Ringkasan Kebijakan (Policy Brief) Perlindungan Perempuan dan Anak Pasca Perceraian.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, dalam <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/>, diakses pada tanggal 12 Maret 2024.
- Erina. 2023. Peranan Pos Bantuan Hukum dan Organisasi Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak dan Mantan Istri (Studi Kasus Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan Pengadilan Agama Bogor). *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum. 2018. Pedoman Penyusunan Skripsi. Tulungagung: Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum IAIN Tulungagung.
- Firmansyah, Hamdan dkk. 2022. *Pelayanan Publik*. Bandung: Media Sains Indonesia.
- Fitri, Bahjah Zal dkk. 2023. Efektivitas Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca Perceraian Studi di Pengadilan Agama Takalar Kelas II, *Journal of Lex Generalis (JLS)*, 4 (2).
- Hamzah dkk. 2022. Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian Dalam Hukum Positif Dan Hukum Islam. *Jurnal Usroh*, 6 (1).
- Hardani, dkk. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu.
- Jamaluddin Athiyah. 2003. *Naḥwa Taf'īl Maqāṣid al-Syari'ah*. Damaskus: Dar Al-Fikr.

Kementrian Agama Republik Indonesia, “Qur’an Kemenag”,  
<https://quran.kemenag.go.id/>.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor  
63/Kep/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan  
Pelayanan Publik.

Kompilasi Hukum Islam

Krisnawati, Titi dkk. 2009. *Strategi Nasional Pemenuhan Hak Konstitusional  
Perempuan*. Jakarta: Komnas Perempuan.

Kurniawan, Moch Ichwan dkk. 2021. Hambatan Pelaksanaan SEMA No. 2 Tahun  
2019 Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Pasca Cerai Gugat Di  
Pengadilan Agama Kabupaten Kediri. *Journal of Law and Family Studies*,  
4 (1).

Laila, Samina dkk. 2023. Strategi Tentang Penjaminan Hak Perempuan Dan Anak  
Pasca perceraian Pada Layanan Yaumuna Di Pengadilan Agama Jember.  
*Al-Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 17 (4).

Lianto. 2011. Keunggulan Balanced Scorecard Sebagai Sistem Manajemen  
Strategi yang Holistik. *Jurnal Ilmiah MABIS*, 3 (2).

Lupiyoadi, Rambat dan A. Hamdani. 2011. *Manajemen Pemasaran Jasa*. Jakarta:  
Salemba Empat.

Mafiah, Yeni. 2023. Legal Realism Roscoe Pound dalam Sidang Pleno MA 2019  
tentang Nafkah *Maḍiyah* Anak. *Mimbar Kampus: Jurnal Pendidikan dan  
Agama Islam*, 23 (1).

- Mahmudah, Himmatul. 2021. Peran Pengadilan Agama Terhadap Pemenuhan Hak-Hak Perempuan Akibat Perceraian Menurut Sema Nomor 2 Tahun 2019 (Studi Kasus Pengadilan Agama Banyuwangi. *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq.
- Novita, Hariyanti. 2020. *Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian : Analisis Pertimbangan Hakim dalam Putusan Pengadilan Agama Padangsidempuan*. Tangerang: Young Progressive Muslim.
- Nurdiansyah, Edwin. 2016. *Keterbukaan Informasi Publik Sebagai Upaya Mewujudkan Transparansi Bagi Masyarakat*. *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 3 (2).
- Pengadilan Agama Jombang. 2022. *LINGKAR (Layanan Informasi Pengadilan Agama Jombang Khusus Anak dan Perempuan)*. Diakses pada 2 Agustus 2023 dalam <https://pa-jombang.go.id/pages/lingkar>.
- Pengadilan Agama Jombang. 2022. *Layanan Lingkaran Pengadilan Agama Jombang, Wujud Komitmen Kepedulian Pada Hak-Hak Perempuan dan Anak Pascaperceraian*. Diakses pada 2 Agustus 2023 dalam <https://www.pa-jombang.go.id/layanan-Lingkar-Pengadilan-Agama-Jombang,-Wujud-Komitmen-Kepedulian-Pada-Hak-Hak-Anak-Dan-Perempuan-Pascaperceraian>.
- Pengadilan Agama Jombang. 2022. *Perlindungan Hak-Hak Perempuan Pasca Perceraian*. Diakses pada 2 November 2023 dalam <https://www.pa-jombang.go.id/article/Perlindungan-Hak-hak-Perempuan-Pasca-Perceraian>.

Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2021.

Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*.

Jakarta: Pusat Bahasa.

Rahayu, Fitri Puji. 2022. Sosialisasi Pemenuhan Hak-Hak Perempuan dan Anak Pasca perceraian dalam Studi Kasus Cerai Gugat (Berdasarkan Surat Direktorat Badilag Nomor: 1960/DJA/hk.00/6/2021) Di Pengadilan Agama Boyolali. *Skripsi*. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Ricky dan Muh. Tanzil Aziz Rahimallah. 2022. *Keterbukaan Informasi Publik Di Indonesia (Perspektif Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi)*. Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, 12 (2).

Samudra, Danang Fiorendo DhiIlmas dkk. 2022. Inovasi Pelayanan Informasi Publik Aplikasi Portal Informasi Pemkab Nganjuk (PING). *Jurnal Academia Praja*, 5 (1).

Saputra, Dian dkk. 2021. Perlindungan Hak Perempuan Dan Anak Dalam Putusan Verstek Di Mahkamah Syarriyah Idi (Protection Of The Rights Of Women And Children In The Verstek Decision At The Idi Shari'yah Court). *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikssaleh*, 9 (2).

Sugiyono. 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Cet ke-24).

Bandung: Alfabeta.

Surat Dirjen Badilag Nomor 1960/DJA/HK.00/6/2021.

Tim Penyusun. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.